

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan gender merupakan permasalahan yang nyata dan ada di dalam masyarakat. Konsep ketimpangan gender merujuk pada kondisi adanya ketidaksetaraan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebab dari ketimpangan gender sendiri disebabkan oleh faktor seperti adanya stereotip yang dialami oleh perempuan (anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah), subordinasi terhadap perempuan, serta adanya nilai-nilai patriarki yang masih dipegang kuat oleh masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, ketimpangan gender sendiri telah menyebabkan dampak yang cukup besar bagi perempuan. Akibat adanya ketimpangan gender, perempuan mengalami kesulitan dalam memenuhi hak, maupun kesejahteraannya baik dari segi sosial hingga ekonomi.

Selain itu, dalam berbagai aspek kehidupan ketimpangan gender juga menyebabkan laki-laki dipandang memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Sehingga tidak mengherankan bahwa kedudukan perempuan kerap kali termarginalkan.

Padahal, dalam ajaran Islam sendiri Allah SWT telah menegaskan bahwa peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki berada di posisi yang sama dan setara dihadapan Allah SWT. Dalam surat Al-Hujarat ayat 13 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (QS. Al-Hujarat 49:13).

Ayat tersebut tidak hanya menjelaskan mengenai anjuran untuk saling mengenal antar sesama manusia (baik itu laki-laki ataupun perempuan). Namun, ayat tersebut merupakan ayat yang menegaskan bahwa manusia yang memiliki kedudukan paling tinggi di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa, dan bukan dilihat dari status sosial ataupun jenis kelaminnya.

Sarifah Suhra (2013, hal. 374) dalam jurnalnya yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya terhadap

Hukum Islamaya” berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang menggambarkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki persamaan baik dalam persoalan ibadah (dimensi spiritual) dan juga dalam kegiatan sosial seperti dalam persoalan karir. Contoh persamaan dalam bidang ibadah yang ditegaskan dalam ayat tersebut adalah bahwa siapa yang giat beribadah, maka ia akan diganjar dengan pahala yang lebih banyak pula. Adapun perbedaan yang dimiliki oleh keduanya (laki-laki dan perempuan) sendiri terletak pada kualitas derajat pengabdian dan ketakwaanya sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, menurutnya ayat ini merupakan ayat yang berusaha menghilangkan pandangan yang menganggap bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan dimana perbedaan tersebut telah menimbulkan salah satu diantara keduanya menjadi termarginalkan.

Selain itu, melalui ayat ini Allah juga mempertegas terkait tujuan diturunkannya Al-Qur’an yang tidak lain adalah untuk menghapus berbagai macam diskriminasi kepada manusia baik dalam bentuk ras, etnis, warna kulit, diskriminasi seksual, dan aspek lainnya. Namun, meskipun Al-Qur’an sendiri menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan serta peran, antara perempuan dan laki-laki, ketimpangan gender masih kerap ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dapat ditemukan dalam persoalan pembangunan. Ketimpangan antara peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan ‘makhluk nomor dua’. Pandangan

tersebut umumnya sering ditemukan pada masyarakat yang masih memegang kuat sistem dan nilai-nilai patriarki.

Dalam persoalan pembangunan, pandangan tersebut menyebabkan suara dan peran perempuan dianggap menjadi tidak terlalu penting untuk diperhitungkan. Padahal, peran perempuan dalam pembangunan sendiri merupakan kewenangan yang harus didapatkan dan dirasakan oleh seluruh warga negara termasuk perempuan baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan juga dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Kabupaten Indramayu sebagai salah satu kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat termasuk sebagai salah satu wilayah yang masih memiliki ketimpangan gender yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, Kabupaten Indramayu juga dapat dikategorikan sebagai wilayah yang masih cukup tertinggal dan belum mencapai hasil yang optimal dalam menumbuhkan kesetaraan berbasis gender. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil laporan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Indramayu yang masih tergolong cukup rendah.

Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau disebut juga sebagai *Gender Development Index* (GDI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa nilai IPG Kabupaten Indramayu pada rentang waktu 2018-2020 terus memperoleh nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2018, Kabupaten Indramayu memperoleh nilai IPG sebesar 87,97 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 0,62 dengan

perolehan nilai total sebesar 88,35. Sedangkan pada tahun 2020, nilai IPG Kabupaten Indramayu mengalami penurunan dengan perolehan nilai sebanyak 0,20 dengan nilai akhir sebesar 88,15. Perolehan nilai tersebut menandakan bahwa tingkat kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki di wilayah Kabupaten Indramayu berada pada posisi yang cukup tergolong jauh dan tertinggal jika disandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada di Jawa Barat lainnya seperti Kabupaten Subang dan Sumedang.

Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) menunjukkan bahwa nilai IKG Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 0,458 dan mengalami penurunan sebesar 0,048 dengan perolehan nilai akhir sebesar 0,410 pada tahun 2019 (BPS RI, 2020, hal. 44).

Indeks Ketimpangan Gender sendiri merupakan upaya penyempurnaan dari Indeks Pembangunan Gender yang berusaha untuk memaparkan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan manusia yang disebabkan oleh adanya diskriminasi gender. Penentuan IKG ditentukan dan diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek kesehatan, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

Aspek kesehatan dihitung dari angka mortalitas (kematian) ibu dan angka fertilitas (kelahiran) pada remaja. Aspek pemberdayaan diukur dari perbandingan keikutsertaan perempuan dalam parlemen dan proporsi

penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMP ke atas untuk laki-laki dan perempuan. Adapun aspek pasar tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan. Pengukuran Nilai IKG tersebut ditentukan berkisar diangka antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai IKG yang dihitung semakin besar, maka hal tersebut menunjukkan semakin tinggi ketimpangan gender di wilayah tersebut (Kemenpppa, 2019, hal. 24).

Tabel 1 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Indramayu

Tahun 2019

| No | Aspek | Tahun 2019 | |
|----------------------------------|---|--------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1. | Proporsi Persalinan Tidak di Fasilitas Kesehatan (%) | - | 10,15 |
| 2. | Proporsi Perempuan Umur <20 tahun saat melahirkan hidup pertama (%) | - | 39,60 |
| 3. | Presentase keterwakilan di parlemen (%) | 66,00 | 34,00 |
| 4. | Proporsi penduduk >25 Pendidikan Minimal SMA (%) | 23,49 | 14,00 |
| 5. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 84,53 | 50,26 |
| Indeks Ketimpangan Gender | | 0.410 | |

Catatan: *) Angka Estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS RI, 2020, hal. 7)

Dengan adanya laporan-laporan tersebut, menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Indramayu masih tergolong cukup tinggi. Laporan tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa keterlibatan serta peran perempuan Indramayu dalam pembangunan masih belum mencapai hasil yang maksimal. Sehingga, perlu dilakukannya upaya yang dapat menghapus ketidaksetaraan dan ketimpangan gender, sekaligus meningkatkan kesejahteraan perempuan dan peran perempuan dalam proses pembangunan di wilayah Kabupaten Indramayu.

Implementasi program pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan di masyarakat baik dalam aspek sosial, kesehatan maupun ekonomi. Di mana melalui kegiatan implementasi tersebut juga diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang ada di masyarakat setempat.

Selain itu, adanya implementasi program pemberdayaan perempuan juga merupakan upaya dan rencana penting dalam menaikkan derajat, peran dan partisipasi perempuan agar mereka dapat memiliki kemampuan untuk lebih mandiri, dan produktif dalam berkarya. Pemahaman mengenai pentingnya peran perempuan tersebut dapat diwujudkan dengan mengedepankan pembangunan berbasis program-program yang lebih mengutamakan perempuan dalam pelaksanaannya.

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Di mana program P2WKSS ini bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, P2WKSS merupakan program yang menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi keluarga agar menjadi lebih sejahtera.

Pada pelaksanaannya, program ini berusaha untuk meningkatkan peran perempuan dengan menjadikannya sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan program. Sehingga dalam pelaksanaan program P2WKSS tersebut, keterlibatan kaum perempuan menjadi sangat penting dalam mewujudkan dan mencapai tujuan pelaksanaan program. Selain itu, dengan adanya keterlibatan perempuan dalam program tersebut, perempuan diharapkan dapat memperoleh berbagai sumberdaya pembangunan dan dapat menyampaikan aspirasi serta hak-hak yang harus dimilikinya. Adapun, sasaran dari program ini sendiri adalah menargetkan keluarga tidak mampu yang berada di wilayah pedesaan dan kelurahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Indramayu.

Implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengatasi permasalahan ketimpangan gender. Selain itu,

implementasi program pemberdayaan perempuan melalui P2WKSS juga merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Indramayu.

Di wilayah Kabupaten Indramayu sendiri, implementasi program pemberdayaan perempuan melalui program P2WKSS dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A Kabupaten Indramayu merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program P2WKSS di Kabupaten Indramayu.

Lebih lanjut, selain didasari oleh Permendagri No. 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan P2WKSS, dasar hukum implementasi program pemberdayaan perempuan melalui program P2WKSS yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu melalui DP3A Kabupaten Indramayu juga dilandasi oleh Kepgub Jawa Barat Nomor 260/1501/bpmd/2005 tanggal 24 Maret tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Di Jawa Barat.

Adapun selain sebagai organisasi pelaksana, DP3A Kabupaten Indramayu juga merupakan organisasi/dinas yang bertanggung jawab dalam keberhasilan program dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi program pemberdayaan melalui P2WKSS tersebut memiliki kesesuaian dan keselerasan antara program dengan kelompok sasaran, maupun dengan kemampuan DP3A Kabupaten Indramayu

sebagai organisasi pelaksana itu sendiri. Karena kesesuaian antara program P2WKSS, DP3A Kabupaten Indramayu, dan kelompok sasaran merupakan faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi program pemberdayaan melalui P2WKSS dalam meningkatkan peran, kesetaraan gender, dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Indramayu.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dan memaparkannya ke dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Model Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (Studi Deskriptif di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dalam implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran (pemanfaat) dalam implementasi program pemberdayaan perempuan

melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Indramayu?

3. Bagaimana kesesuaian antara kelompok sasaran (pemanfaat) dengan organisasi pelaksana dalam implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realita dari:

1. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dalam implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Indramayu.
2. Kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran dalam implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Indramayu.
3. Kesesuaian antara kelompok sasaran (pemanfaat) dengan organisasi pelaksana dalam implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah referensi bagi kajian ilmu Pengembangan Masyarakat Islam khususnya mengenai model implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Indramayu.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap semoga penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung bisa memberikan faedah dan berguna kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti:

a. Bagi penulis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah dan wawasan penulis dan juga sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama menempuh bangku perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran terkait implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Selian itu, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan

untuk membuat aturan dan kebijakan yang lebih baik dalam program-program pemberdayaan perempuan selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat umum dan menjadikannya sebagai sarana informasi dalam memahami program pemberdayaan perempuan melalui implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Implementasi merupakan proses mengembangkan kegiatan suatu interaksi dengan cara saling menyelaraskan antara tujuan serta tindakan. Adapun untuk memperoleh hal tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana, dan sistem birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004, hal. 39).

Aji Wahyudi (2016, hal. 100) dalam jurnalnya yang berjudul *“Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat”* memaparkan implementasi sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik yang biasanya dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang pasti.

Rian Nugroho (2009, hal. 494) memaparkan implementasi kebijakan sebagai suatu cara yang dilakukan agar suatu kebijakan bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan matang, tidak lebih

maupun kurang. Ia menambahkan bahwa dalam prosesnya, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu dengan langsung merealisasikannya dalam program-program ataupun dengan membuat rumusan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.

Adapun terkait model-model implementasi yang telah dipaparkan oleh berbagai ahli, David C Korten merumuskan sebuah model implementasi program yang lebih memfokuskan pada pendekatan proses pembelajaran atau disebut juga dengan model kesesuaian implementasi program.

Model yang dikembangkan oleh Korten ini, pada dasarnya mengkaji mengenai kesesuaian antara tiga unsur yang harus ada di dalam suatu pelaksanaan program. Tiga unsur tersebut terdiri dari organisasi pelaksana, program, dan kelompok sasaran atau penerima manfaat program.

Melalui model ini, Korten memaparkan bahwa sebuah program tidak akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan apabila dalam pelaksanaannya tidak mempunyai kesesuaian dari tiga unsur implementasi program tersebut. Kesesuaian antara tiga unsur tersebut terdiri dari; *pertama*, kesesuaian terkait program dengan organisasi pelaksana, yakni keselarasan terkait tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Kedua*, kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, yakni keselarasan terkait apa yang diberikan oleh program dengan apa yang menjadi kebutuhan kelompok sasaran

(penerimaan manfaat). Dan *ketiga*, kesesuaian terkait kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana, yakni keselarasan antara syarat yang diputuskan oleh organisasi pelaksana untuk dapat mencapai *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran (Akib & Tarigan, 2008, hal. 12).

Pemberdayaan menurut Parson dalam Marmoah (Marmoah, 2012, hal. 52) didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk berperan serta dalam berbagai pengontrolan, dan dapat memberi pengaruh pada peristiwa-peristiwa serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Parson juga menambahkan bahwa pemberdayaan memfokuskan pada usaha agar seseorang dapat mendapatkan pengetahuan, keterampilan, serta kekuasaan yang pantas sehingga dapat memberikan pengaruh kepada hidupnya dan hidup orang lain yang menjadi perhatiannya.

Shardlow dalam Marmoah (2012, hal. 53) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan untuk menghasilkan perubahan kondisi kehidupan, dan kemampuan masyarakat yang lebih baik. Pemberdayaan menurutnya adalah bagian dari serangkaian perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang ada.

Marmoah (2012, hal. 66) dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*” menjabarkan bahwa ide pemberdayaan perempuan dalam wacana pembangunan memiliki arah pandang yang sangat umum. Menurutnya pemberdayaan perempuan adalah upaya menaikkan taraf kemandirian perempuan dengan tetap menaati nilai-nilai kebhinekaan dan kekhasan lokal.

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan termasuk kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Selain itu, secara garis besar pemberdayaan perempuan harus mengarah pada pencapaian kesadaran gender, serta peningkatan kemampuan melalui kegiatan untuk menghasilkan pendapatan (IGA: *Income Generating Activities*), dan kondisi lingkungan. Kemudian, indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari kondisi sebagian mayoritas perempuan yang telah berhasil memperoleh kebebasan memilih menjadi mandiri, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri mereka. Sehingga mereka dapat merasakan akses kesetaraan dalam sumber daya baik dalam wilayah domestik ataupun publik (Hubeis, 2010, hal. 125-126).

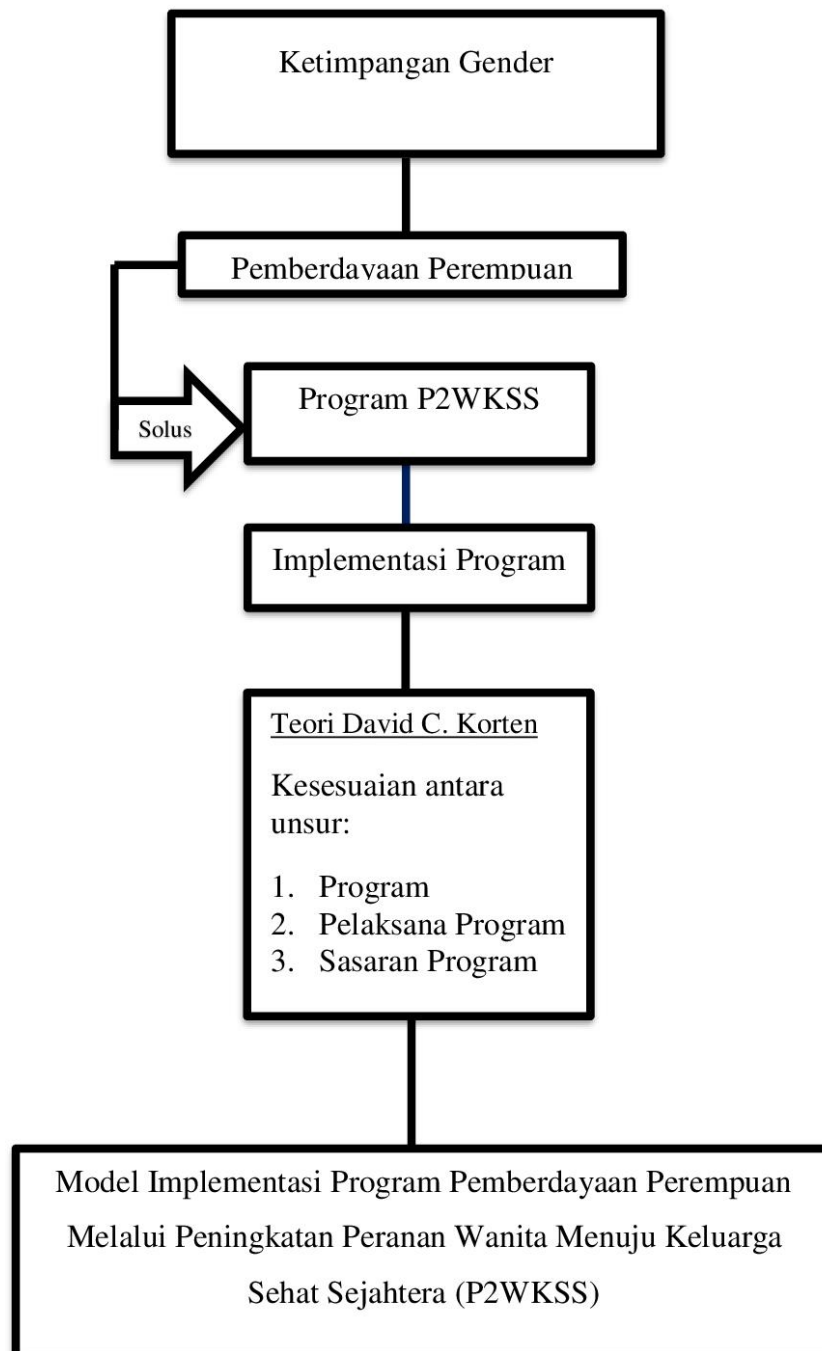
Menurut Karl dalam Hasanah (2013, hal. 76), pemberdayaan perempuan dijelaskan sebagai sebuah proses sadar sebagai upaya untuk membentuk kemampuan dan keterampilan (*capacity building*) dengan cara bergabung dalam keikutsertaan yang lebih besar. Agar kekuasaan dan pengawasan dapat dicapai dalam pembuatan keputusan, serta mewujudkan

transformasi (*transformation action*) agar perempuan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Program P2WKSS memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat, kedudukan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan dan diawali dari lingkungan keluarga agar menjadi keluarga yang sehat, sejahtera dan bahagia (Asdalani & Putri, 2019, hal. 560).

Tidak hanya itu, program P2WKSS juga termasuk sebagai salah satu program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PEP). Program PEP sendiri merupakan program yang bertujuan untuk memberi perhatian khusus kepada kelompok keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Selain itu, program P2WKSS juga dipandang sebagai program yang memiliki kaitan erat dengan berbagai isi pokok dari program pemberdayaan perempuan. Hal ini didasari karena program P2WKSS menjadikan perempuan yang ada di masyarakat sebagai subjek, dan penggerak utama dalam pelaksanaan programnya. Kemudian, program P2WKSS juga merupakan program yang sangat strategis untuk memajukan dan mengembangkan SDM dan SDA serta lingkungan di masyarakat (Kemenpppa, 2012, hal. 6).

2. Kerangka Konseptual



3. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut merupakan hasil penelitian yang relevan dan digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Puji Astutik mahasiswa Jurusan Filsafat Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Implementasi *Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo)*. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi program P2WKSS di Desa Sawocangkring telah dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing oleh para pelaksana. Namun, usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga hasilnya masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena implementasi Program (P2WKSS) di Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo masih sebatas pada tahap penyelenggaraannya saja, tanpa adanya tindak lanjut dari program tersebut. Sehingga, pelaksanaannya terkesan menjadi tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, dukungan pemerintah setempat untuk melakukan tindak pemberdayaan secara berlanjut sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat program yang lebih besar. Adapun faktor-faktor seperti sumber daya, komunikasi, struktur organisasi dan sikap para pelaksana kegiatan merupakan faktor yang sangat memengaruhi pelaksanaan Program (P2WKSS) di

Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Adapun dalam penelitian tersebut, secara garis besar penulis menyarankan agar dilakukan pendampingan serta *monitoring* kepada kelompok binaan sampai kelompok binaan tersebut bisa menjadi lebih mandiri.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Arianne Sarah mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keluarga (Studi Kasus Anggota Perempuan Koperasi Teratai Putih Kelurahan Pejaten Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan)*”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arianne Sarah, implementasi program pemberdayaan perempuan melalui pendidikan keuangan yang dilaksanakan di Koperasi Teratai Putih telah memperoleh tiga elemen dari model implementasi David C. Korten. Hal tersebut dilihat dari pertama adanya program yang direncanakan dengan baik. Kedua, pelaksana atau fasilitator program telah memahami tugasnya dengan baik, dan ketiga adalah adanya kebutuhan sasaran dari program yang telah selaras dengan program yang dilaksanakan. Selain itu, implementasi program pendidikan keuangan yang dilakukan oleh para peserta telah memperlihatkan adanya hasil yang cukup baik sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikator literasi keuangan menurut Chen dan Volpe seperti;

melakukan persiapan dana untuk hari tua, terlibat dalam lembaga keuangan formal seperti koperasi, telah memiliki pengetahuan dasar untuk melakukan manajemen keuangan dengan cara membuat anggaran rumah tangga secara sederhana, memiliki kesadaran untuk mengutamakan menabung ke dalam post-post keuangan, serta telah memiliki kesadaran berwirausaha sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian sehingga diharapkan dapat memengaruhi posisi tawar dalam keluarga.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurgina mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *“Pemberdayaan Perempuan melalui PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi)”*. Menurut Siti Nurgina, Pelaksanaan program pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk KBP3APM merupakan suatu langkah yang sangat positif supaya bisa meningkatkan perekonomian keluarga khususnya untuk perempuan yang berstatus janda dan umunya untuk perempuan yang ingin membantu perekonomian keluarganya. Hal tersebut dilihat dari pelatihan-pelatihan, peningkatan sumberdaya manusia, bimbingan kewirausahaan, terjun ke dunia usaha sendiri, toko, dan modal usaha,

yang dilaksanakan dalam program PEKKA. Selain itu, dengan dukungan program yang sangat menjamin ini bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan dan bisa merubah kehidupan keberlangsungan hidup mereka di masa depan. Selain itu, hasil dari program PEKKA dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut: meningkatnya taraf hidup perempuan, membangun kesadaran kritis anggota PEKKA, dan terpenuhinya kebutuhan keluarga.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sebagai lokasi pelaksanaan program P2WKSS pada tahun 2019. Alasan pemilihan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut: *pertama* adanya permasalahan dan gejala yang memungkinkan untuk dapat diteliti, *kedua* tempat tersebut memiliki dan menyediakan data-data dibutuhkan dalam kegiatan penelitian ini, dan *ketiga* karena lokasi tempat tersebut berdekatan dengan lokasi tempat tinggal penulis. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat memudahkan penulis dalam melakukan pencarian data-data terkait penelitian.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang menggambarkan mengenai bagaimana cara pandang peneliti dalam memandang fakta kehidupan sosial dan memengaruhi perlakuan peneliti pada teori yang dijadikan sebagai sudut pandang yang mendasar dari sebuah disiplin ilmu mengenai apa yang menjadi pokok dan inti persoalan yang semestinya dipelajari (Ridha, 2017, hal. 67).

Dalam kegiatan penelitian ini paradigma penelitian yang dipakai adalah paradigma pendekatan kualitatif. Menurut Kuswana (2011, hal. 43), paradigma penelitian kualitatif memandang realitas sosial satu kesatuan, dinamis, penuh makna, dan sebagai sesuatu yang utuh (holistik).

Kuswana (2011, hal. 44) juga berpendapat bahwa penghimpunan data pada penelitian kualitatif tidak dibimbing oleh teori, tetapi dibimbing oleh fakta-fakta yang didapatkan pada saat penelitian di lapangan. Sehingga analisis data yang dilaksanakan bersifat induktif dan didasarkan pada fakta-fakta yang didapatkan yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis ataupun teori.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Menurut Soehadha (2018, hal. 23), penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggali dan menggolongkan sebuah gejala atau kenyataan sosial dengan cara menjabarkan beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan unit yang diteliti. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk memperoleh data

secara mendetail, objektif, dan apa adanya terkait fenomena dan kondisi lapangan yang diteliti oleh penulis.

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad dalam Kuswana (2011, hal. 37) penelitian deksriptif bertujuan pada proses penyelesaian masalah yang ada pada masa sekarang. Adapun metode penelitian deskriptif sendiri adalah istilah umum yang merangkum berbagai teknik deskriptif seperti penelitian yang menceritakan, menganalisis, dan mengklasifikasikan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Sebuah data kualitatif sendiri harus memenuhi kriteria seperti terdiri dari data yang didasarkan pada fakta dan pasti, dan bukan data yang hanya sekadar terlihat, tampak, dan terucap, tetapi merupakan data yang memiliki makna di balik yang terlihat, tampak, dan terucap. (Kuswana, 2011, hal. 44).

Untuk memperoleh data kualitatif tersebut, peneliti menggunakan berbagai macam cara serta teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, diskusi, dan melakukan analisis dokumen yang kemudian dituangkan kedalam catatan lapangan atau transkrip. Adapun wujud lain dari data kualitatif dapat berupa gambar yang dihasilkan melalui pengambilan gambar atau rekaman video (Siyoto & Sodik, 2015, hal. 59).

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari pihak DP3A Kabupaten Indramayu selaku organisasi pelaksana program P2WKSS, fasilitator kegiatan dalam program P2WKSS, serta kepala desa, dan kelompok masyarakat Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu selaku kelompok sasaran dari implementasi program P2WKSS di Desa Tanjungsari pada tahun 2019.

2) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari data kepustakaan, dokumen-dokumen, teori-teori yang berkaitan dengan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) serta sumber data lain dari kegiatan-kegiatan anggota P2WKSS (Peranan Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera).

5. Penentuan informan atau Unit Analisis

Informan merupakan narasumber yang menyampaikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini pihak yang menjadi informan pihak DP3A Kabupaten Indramayu selaku organisasi pelaksana program P2WKSS, fasilitator kegiatan dalam program P2WKSS, serta kepala desa, dan kelompok masyarakat Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu selaku

kelompok sasaran dari implementasi program P2WKSS di Desa Tanjungsari pada tahun 2019.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2018, hal. 145) menyampaikan bahwa observasi adalah sebuah proses yang terdiri dari pelbagai proses biologis dan psikologis sehingga observasi disebut juga sebagai suatu proses yang kompleks. Adapun dua hal penting yang menjadi perhatian dari metode observasi adalah proses-proses ingatan dan pengamatan.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan wujud dari komunikasi yang terjadi pada dua orang. Pada prosesnya wawancara terdiri dari dua orang yang ingin mendapatkan informasi dari seseorang lainnya dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. (Mulyana, 2006, hal. 180).

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan penelitian seperti pihak DP3A Kabupaten Indramayu selaku organisasi pelaksana program P2WKSS,

fasilitator kegiatan dalam program P2WKSS, serta kepala desa, dan kelompok masyarakat Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu selaku kelompok sasaran dari implementasi program P2WKSS di Desa Tanjungsari pada tahun 2019.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode yang dilaksanakan dengan cara mengolektifkan data-data yang berasal dari arsip, teori, buku, pendapat, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, teknik penentuan keabsahan data yang dipakai adalah teknik penentuan keabsahan data triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan teknik pengujian data yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, ataupun interpretatif dari penelitian kualitatif.

8. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, metode observasi, wawancara, dan studi dokumen merupakan metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data selengkap-lengkapnyanya yang kemudian ditulis serta dianalisis secara terperinci dan sistematis.

b. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data penelitian, maka data tersebut akan melalui tahap reduksi. Mereduksi dapat diartikan sebagai proses

meringkas, memilah hal-hal inti, mencari tema dan polanya, dan memusatkan pada aspek-aspek penting serta menghilangkan data yang tidak perlukan (Siyoto & Sodik, 2015, hal. 100).

c. Penyajian Data atau *Display Data*

Menurut Milen dan Hubermen dalam Siyoto & Sodik (2015, hal. 101), penyajian data ialah sekumpulan informasi yang disusun dan dapat memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan sebuah kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Verifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam tahap ini peneliti menyampaikan kesimpulan terkait data-data yang telah diperoleh.

